

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN MELALUI FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

Septinus Eduard Ginting¹Dadang Sufianto²Dahly Sukmapriyandhika³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*Email Korespondensi : eduardgint@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Satuan Komando Kewilayahan melalui Fungsi Biner dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal di Kabupaten Sukoharjo. Identifikasi masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini adalah kurangnya implementasi kolaborasi yang optimal antara Pemerintah Daerah dan Kodim dalam melaksanakan pembinaan teritorial untuk pengembangan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo. Jadi peneliti merumuskan masalah penelitian utama, yaitu bagaimana mengimplementasikan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kodim Sukoharjo, yang juga dirumuskan terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi yang menyebabkan pelaksanaan kolaborasi tersebut tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kodim Sukoharjo terkait pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pelaksanaan Binter oleh Kodim Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kolaborasi tidak optimal. Implementasi masih didominasi oleh Komando Distrik Militer Sukoharjo. Kebersamaan adalah dimensi dengan hasil yang baik, dan kohesi adalah dimensi dengan hasil penelitian yang belum optimal.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengembangan, Ekonomi Lokal, Kabupaten Sukoharjo

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Abstract

This research is entitled Collaboration between Regional Government and Regional Command Units through the Binary Function in Developing Lokal Economic Potential in Sukoharjo Regency. The identification of the problem that is the basis for carrying out this research is the lack of optimal implementation of collaboration between the Regional Government and Kodim in implementing territorial guidance for the development of lokal economic potential in Sukoharjo district. So the researcher formulated the main research problem, namely how to implement the collaboration between the Regional Government and the Sukoharjo District Military Command, which was also formulated in relation to the obstacles faced which caused the implementation of the collaboration to not be optimal. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and literature studies. Data analysis is carried out by means of data reduction, data display, and drawing conclusions and verification.

The results of the research show that the implementation of collaboration carried out by the regional government and the Sukoharjo Kodim related to developing lokal economic potential through the implementation of Binter by the Sukoharjo Kodim has gone well. However, there are still several obstacles or obstacles that cause the implementation of collaboration to not be optimal. Implementation is still dominated by the Sukoharjo District Military Command. Togetherness is a dimension with good results, and cohesiveness is a dimension with research results that are not yet optimal.

Keywords: Collaboration, Development, Lokal Economy, Sukoharjo Regency

PENDAHULUAN

Pada aspek penyelenggaraan pembangunan negara saat ini, tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah adalah mewujudkan pemerataan. Pemerataan pembangunan merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana telah digariskan dalam Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Apabila kita mengutip pendapat yang disampaikan Tjokroamidjojo (1998:4) dijelaskan bahwa pembangunan merupakan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik. Sehingga, pembangunan bermaksud menciptakan perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya yang memiliki output terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan transformasi sistem penyelenggaraan pemerintah dari terpusat menjadi sistem desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Regulasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mereformasi tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengelola urusannya berdasarkan asas desentralisasi, dokensentrasi dan asas tugas perbantuan.

Hal pokok yang menjadi pertimbangan pembangunan daerah saat ini adalah bagaimana sebuah daerah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya. Artinya dalam konteks peningkatan potensi ekonomi saat ini, arah yang dituju dalam pengembangan ekonomi adalah wilayah harus mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu berintegrasi ke dalam sistem perekonomian regional, nasional maupun global. Pengelolaan wilayah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjadi suatu upaya menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal, sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Strategi pengembangan wilayah bertumpu pada sumber daya lokal ini dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal (*lokal economic development*). Setiap daerah tentunya mempunyai potensi ekonomi dan corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain.

Dengan mengacu pada Undang Undang No. 23 Tahun 2034 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal, maka secara otomatis menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu memiliki orientasi yang secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar daerah bahkan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kondisi perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayahnya dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sasaran utama pembangunan ekonomi dalam konsep peningkatan potensi ekonomi lokal ini adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang tersedia dari sektor ekonomi baik tingkat makro, mikro maupun industri besar yang diperoleh dari pengembangan potensi ekonomi yang ada pada suatu masyarakat. Karena dengan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja yang tersedia tersebut, dalam proses jangka panjang, akan memicu terjadinya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk mencapai peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja tersebut, Pemda dituntut mampu untuk mengambil suatu inisiatif dalam memikirkan dan mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerahnya.

Ekonomi lokal sendiri adalah pengembangan wilayah yang sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan-kelembagaan di wilayah tersebut meliputi, Pemerintah Daerah, institusi negara yang berada di daerah (Pertahanan-Keamanan) perguruan tinggi, pengusaha lokal dan masyarakat. Karena itu konsep peningkatan potensi ekonomi lokal menekankan pada aspek penumbuhan dan pengembangan peran Pemda, institusi pemerintahan yang ada di daerah, sektor swasta dan partisipasi serta inisiatif masyarakat lokal dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan potensi wilayah, bila dikaitkan dengan kegiatan sektor ekonomi yang terdapat di suatu wilayah tidak akan terlepas dari bagaimana sektor ekonomi tersebut dapat berperan sebagai pemacu berkembangnya sektor-sektor lain di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan melalui fungsi Pembinaan Teritorial dalam pengembangan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Subagyo, 2023) yang menyatakan bahwa dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena Subagyo (2023) menyimpulkan bahwa: Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kompleks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti.

KERANGKA TEORI

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung Jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Kolaborasi memiliki tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa orang yang terus berkesinambungan. (Anderson, E.T. & J. McFarlane, 2004) Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggungjawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckert yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama. (Lindeke, L., Sieckert, 2005). Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani, 2007) Hal tersebut juga disampaikan Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Teknik Analisis Data

Menurut Patton (dalam Subagyo, 2023), teknik analisis data adalah “proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan menafsirkan yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian”.

Dalam penelitian ini data di analisis dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi : merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.
3. Tahap penyajian hasil penelitian : tahap ini dilakukan setelah tahap

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

PEMBAHASAN

Ditengah kondisi ekonomi negara yang tidak stabil akibat perubahan ekonomi global saat ini, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, dengan ditopang transformasi infrastruktur sebagai prioritas program/proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu seiring dengan proyeksi Indonesia maju telah menjadi diskursus intelektual yang hangat dibicarakan di forum-forum internasional, setidaknya dapat kita cermati dari publikasi PwC dalam terbitan berkala, *The Long View: How will the global economic order change by 2050?* yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dunia setelah China, India dan Amerika Serikat pada tahun 2050.

Salah satu laporan yang ditulis oleh *McKinsey Global Institute* (MGI) pada September 2012 yang berjudul *The Archipelago Economy: unleashing Indonesia's potential*, yang isinya antara lain memprediksi hal yang sama, yaitu peningkatan perekonomian Indonesia, dari peringkat ke-17 pada 2012 menjadi peringkat ke-7 pada 2030. Dua laporan ini mewakili begitu banyak analisis yang optimistis terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Beragam pemikiran tentang optimisme perekonomian Indonesia pada masa mendatang, tentunya membutuhkan prakondisi yang harus segera diwujudkan sebagai pilar pendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Peta jalan yang diimplementasikan secara konsisten, dalam meningkatkan produktivitas yang salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan ekonomi pada setiap wilayah di Indonesia yang dikenal dengan istilah ekonomi lokal. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut harus tumbuh didalam ekosistem yang dirancang kondusif untuk tumbuh kembangnya basis perekonomian yang produktif dan berdaya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

saing, yang ditandai dengan peningkatan penerimaan daerah dari sektor potensi yang dimiliki. Dalam pengembangan ekonomi wilayah maka diperlukan pembangunan ekonomi yang basis produksi lokal yang kondusif terhadap peningkatan nilai ekonomi, yang mampu menghasilkan keluaran (*output* perekonomian) dari sumber daya (faktor produksi) yang mampu mendorong bergeraknya perekonomian produktif lokal, dengan berkembangnya sektor industri UMKM yang menghasilkan produk berorientasi ekspor. Dengan kata lain langkah krusial dalam jangka pendek adalah bagaimana mengembangkan industri lokal secara massif di seluruh wilayah di Indonesia. Industri pengolahan harus mampu memberi nilai tambah (*value added*) pada produk-produk yang dihasilkan. Sejalan dengan itu, hilirisasi subsektor industri manufaktur yang menjadi penopang tumbuh kembangnya ekonomi lokal tentu memiliki keterkaitan kuat ke depan (*forward linkage*) patut dijadikan prioritas.

Lesson learn dari sukses transformasi ekonomi pada beberapa negara maju, membuktikan peranan sektor industri yang lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonominya. Peran strategis sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi, bukan tanpa alasan, karena sektor industri akan membawa dampak turunan, yakni meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*). Kondisi tersebut menjadi realistis untuk dicapai karena kita memiliki bonus demografi (*demographic window*), dimana proporsi populasi kelompok usia pekerja mengungguli populasi kelompok non-usia pekerja.

Merujuk data BKKBN, diperkirakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030, kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar (70 persen dari total penduduk atau sekitar 180 juta penduduk), dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas usia 65 tahun) yang hanya berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Momentum ini harus dapat dioptimalkan nilai tambahnya dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa, agar dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, khususnya dalam mengkapitalisasi bonus demografi melalui transformasi pembangunan ekonomi lokal agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

berdaya saing, dan berkualitas.

Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan ditengah kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian akibat kompetisi yang semakin tajam, geostrategis ekonomi global berubah cepat akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selain itu penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia, serta pelanggaran kebijakanmoneter yang diambil sejumlah negara rentan terhadap negara lainnya. Berbagai langkah strategis kebijakan ekonomi Indonesia yang telah diambil pemerintah yang mampu menciptakan kemajuan berarti ditengah ketidakpastian ekonomi global, indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya masih berada pada tren positif, bila dibandingkan negara besar lainnya. Untuk memperkokoh hal tersebut menjadi nyata adalah pentingnya pencapaian pembangunan ekonomi, untuk menjaga momentum positif guna dapat terus meningkatkan kemakmuran warga negara. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan ekonomi saat ini seyogyanya berfokus pada pemanfaatan potensi lokal kewilayahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan transformasi ekonomi berbasis UMKM, pelaku usaha di daerah lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi yang maju, serta kepastian adanya *offtaker* yang akan membeli produk UMKM dengan harga dan kualitas yang baik. Diperlukan upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur yang telah dan akan terus secara massif dilakukan pemerintahan saat ini, sambil memperkuat implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan melalui pilar kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Di samping itu, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, utamanya dalam menciptakan regulasi yang mampu menyiapkan SDM berkualitas, serta memastikan pekerja mendapat pekerjaan yang layak melalui peningkatan keterampilan yangberkelanjutan.

Bercermin dari besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

menjadi jelaslah betapa pentingnya sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder di bidang ekonomi sebagai langkah strategis dalam mengefektifkan penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi. Kerja keras dan fokus perlu terus diupayakan oleh seluruh instansi pemerintah agar target pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal sebagaimana yang telah digariskan, dapat dicapai dengan memberi perhatian khusus terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sarana pembangunan di wilayah. Sikap optimistis perlu terus ditumbuhkan, pondasi ekonomi yang telah dibangun, agar dapat menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia merebut peluang pasar.

Melalui semangat gotong royong dan sinergitas dari segenap komponen bangsa, utamanya dalam membangun optimisme kemajuan Indonesia melalui pembangunan ekonomi. Industri (perindustrian) baik yang skala makro maupun mikro didaerah merupakan salah satu komponen perekonomian yang sangat penting. Perindustrian memungkinkan perekonomian Indonesia berkembang pesat dan semakin baik, sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian nasional. Sekarang ini, banyak negara-negara di dunia terus berupaya untuk menumbuhkan ekonominya termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut saling bersaing untuk mendapatkan tempat di pasar global. Karena di dalam pasar global itu sendiri terjadi perdagangan bebas barang dan jasa antar negara. Apalagi sejak akhir tahun 2015, pemerintah negara-negara ASEAN mulai menerapkan kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang berarti pasar tunggal ASEAN.

Dengan diberlakukannya MEA, masyarakat dapat menjual barang-barang hasil produksinya ke negara di ASEAN dengan mudah. Namun hal ini juga tidak terlepas dibarengi dengan akan banyaknya produk-produk yang masuk kedalam negeri sehingga menjadikan persaingan menjadi lebih ketat. Untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan jasa dalam negeri terhadap serangan dari beragam produk dan jasa dari luar negeri, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memperkenalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN disebut dalam satuan persentase yang menunjukkan berapa kandungan bahan yang berasal dari dalam negeri (bukan import) dalam suatu

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

komponen barang atau jasa tertentu.

Hal ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dalam negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa. Pemerintah mewajibkan bagi peserta pengadaan barang/jasa untuk menggunakan produksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit besar atau sama dengan 25%, seperti yang sudah di atur dalam Perpres no 54 tahun 2010 pasal 98 ayat 3 tentang pengadaan barang/ jasa. Oleh karena itu, TKDN menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Keberhasilan pemanfaatan produksi dalam negeri tersebut tentunya memerlukan komitmen penuh dari seluruh komponen bangsa, salah satunya institusi pertahanan negara.

Ancaman resesi ekonomi perlu dipandang sebagai ancaman nyata terhadap pertahanan negara. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak resesi ekonomi yang dapat berpotensi melahirkan konflik-konflik yang berujung pada disintegrasi bangsa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dalam mengantisipasi ancaman resesi ekonomi nasional melalui keberadaan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) jajarannya. Sehingga TNI AD perlu mengoptimalkan fungsi Satkowil dalam membantu Pemerintah Daerah mewujudkan keberhasilan pemanfaatan produksi dalam negeri di setiap daerah.

Pelaksanaan tugas membantu Pemerintah Daerah merupakan bagian tidak terlepas dari Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam konteks mengatasi ancaman resesi ekonomi, tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Satkowil dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) dalam rangka

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Salah satu Satkowil yang memiliki fokus dalam mengatasi ancaman resesi ekonomi adalah Kodim 0726/Sukoharjo. Sebagai Satkowil di bawah Korem 074//Warastratama, keberadaan Satkowil tentunya menjadi strategis dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri di wilayah Kabupaten Sukoharjo melalui pelaksanaan fungsi Binter.

Guna mewujudkan keberhasilan peran Kodim 0726/Sukoharjo membantu Pemerintah Daerah pemanfaatan produksi dalam negeri dalam upaya mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, maka perlunya optimalisasi penyelenggaraan Binter yang dilaksanakan. Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah dalam membangun ekonomi perlu diaktualisasikan oleh setiap Pemerintah Daerah. Kolaborasi ditetapkan sebagai upaya strategis dalam mencapai hal tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan tema penelitian ini, Kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Satuan Komando Kewilayahan Kodim Sukoharjo dalam pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi sangat strategis. Hal ini disebabkan salah satu tugas TNI AD adalah membantu daerah salah satunya melalui konsep pembinaan teritorial. Sehingga dengan kolaborasi, fungsi Binter yang dilaksanakan Kodim Sukoharjo dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Sukoharjo terutama dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.

Kolaborasi Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan Kodim Sukoharjo dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kabupaten Sukoharjo melalui metode pembinaan teritorial.

Pada tahun 2023, Pemerintah optimis akan memberikan kontribusi positif baik dari segi pembangunan ataupun perekonomian. Meskipun sudah banyak lembaga dunia yang memprediksi bahwa laju ekonomi global akan mengalami ancaman resesi ekonomi dan lonjakan inflasi namun pemerintah optimis bahwa target ekonomi nasional tahun ini bisa mencapai lebih dari lima persen. Untuk itu pemerintah pusat sudah mempersiapkan kebijakan- kebijakan strategis dalam rangka sinergi ragam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sektor untuk menjadikan tumpuan ekonomi tahun 2023 termasuk di Pemerintah Daerah.

Salah satu hal yang paling utama di dalam sinergitas berbagai sektor untuk menopang perekonomian nasional dan daerah adalah penguatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perputaran ekonomi di daerah dapat bertahan dan bisa berkembang secara perlahan, sehingga mampu menjaga roda perputaran ekonomi di tingkat daerah. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengantisipasi ancaman resesi ekonomi adalah dengan mengeluarkan program “Bangga Buatan Indonesia”.

Program tersebut merupakan upaya pemerintah agar masyarakat Indonesia mencintai produk buatan dalam negeri dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke *platform digital*, dari program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah, menciptakan *value creation* bagi IKM/UKM, dan meningkatkan permintaan produk-produk UMKM lokal.

Guna melihat, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan Kodim, maka peneliti mencoba mengulas berdasarkan dimensi kolaborasi yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya. Berikut peneliti uraikan hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan dimensi teori kolaborasi yang ditetapkan.

Dimensi Kebersamaan

Pada hakikatnya, kolaborasi itu merupakan pola hubungan yang rumit dan kompleks dengan berbagai konsekuensi yang timbul, baik konsekuensi yang bersifat materiel maupun yang bersifat immateriel. Oleh sebab itu, agar kolaborasi yang dibentuk dapat diselenggarakan secara optimal dan bisa berhasil dengan baik, sebelum *agreement* tentang kolaborasi itu dibuat, ada prasyarat umum yang terlebih dahulu harus ada kesepakatan dengan penuh kesadaran dan rendah hati agar mereka bisa saling berbagi antarpihak, tanpa ada pihak-pihak tertentu yang merasa terpaksa dan tertekan. Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan kolaborasi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

antara Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan Kodim Sukoharjo, dimana unsur kebersamaan merupakan esensi utama yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum pelaksanaan kolaborasi ditinjau dari aspek kebersamaan sudah berjalan dengan baik, hal itu sebagaimana yang disampaikan Informan Bupati Sukoharjo yang mengatakan Hal tersebut, peneliti konfirmasi melalui kegiatan wawancara dengan Dandim Sukoharjo, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Dandim Sukoharjo.

Tanggung jawab

Tanggung jawab dalam organisasi merupakan sikap yang ditunjukkan dalam mewujudkan tujuan dari organisasi. Sikap tanggung jawab dalam bekerja adalah bagian dari kinerja institusi. Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Bertanggung jawab atas apa yang dilimpahkan pimpinan akan menjamin kepercayaan pimpinan dan menjaga kenyamanan kerja serta produktifitas kerja. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya. Dalam pelaksanaan kolaborasi antara lembaga pemerintah sering dijumpai adanya tugas dan fungsi antar bagian maupun satuan kerja dalam suatu organisasi yang tumpang tindih khususnya organisasi pemerintahan.

Hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain, tidak adanya pemisahan yang jelas antara satuan kerja yang mempunyai tugas pokok sebagai perumus peraturan dengan satuan kerja sebagai pelaksana peraturan itu sendiri. Hal ini akan berdampak adanya program kerja yang menghasilkan output yang nyaris sama atau dengan nomenklatur yang berbeda namun dengan hasil yang sama. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip anggaran pemerintah saat ini yang menitik beratkan *money follow program* sebagai landasan pelaksanaan kerja. Untuk mengatasi kondisi di atas perlu dilakukan suatu upaya harmonisasi yang mengikat sehingga kedepan tidak lagi ada satuan kerja yang saling tumpang tindih. Hal yang paling mungkin adalah dengan membuat desain organisasi yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang dibebankan negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan Kodim Sukoharjo

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dalam pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pelaksanaan fungsi Binter tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

Komunikasi (Berbagi Informasi)

Dalam sebuah organisasi, informasi adalah sumber daya. Informasi mempunyai nilai, dan informasi memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Informasi dapat menggambarkan kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data yang dapat berbentuk huruf, simbol, alfabet, dan lain sebagainya. Kerjasama saat ini dipandang suatu cara untuk memecakan suatu masalah dalam organisasi. Salah satu bentuknya adalah kerjasama antar institusi negara. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan Intistusi pertahanan TNI AD. Kerjasama tersebut berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekonomi wilayah. Permasalahan yang muncul adalah mengenai distribusi dan kendali proses informasi. Setiap kerjasama lebih efektif jika dilakukan dengan kolaborasi sesuai dengan program kerja yang telah disepakati. Kolaborasi sendiri melibatkan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan perjanjian kerjasama. Model kolaborasi harus dipilih dengan cermat sesuai dengan bentuk kerjasamanya.

Hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kepercayaan yang terbangun antara Pemerintah Daerah dengan TNI AD sudah terbangun dengan baik. Hal itu disebabkan proses komunikasi yang dilaksanakan dapat mencegah dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Bappeda Sukoharjo yang menyebutkan bahwa :

“Kami intens komunikasi, dan itu efektif untuk menganalisis permasalahan kecil yang terkadang terlupakan dan bisa membahayakan untuk masalah kepercayaan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada aspek pelaksanaan kolaborasi secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kodim Sukoharjo terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penyelenggaraan Binter oleh Kodim Sukoharjo sudah berjalan secara baik. Pada aspek kebersamaan pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi lokal oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dan Kodim Sukoharjo terlaksana pada level pimpinan, namun secara umum belum terlaksana pada level teknis. Pada dimensi kebersamaan, kolaborasi didominasi oleh pihak Kodim Sukoharjo sedangkan Pemerintah Daerah Sukoharjo berperan secara pasif, artinya pemerintah Sukoharjo dalam melaksanakan kontribusi dan pengerahan kemampuan didasarkan pada aspek permintaan dari Kodim Sukoharjo.

Selanjutnya pada aspek kepercayaan sudah terbangun dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi yang dibangun baik di level pimpinan maupun di level anggota atau pegawai. Kepercayaan yang tinggi dari Pemerintah Daerah terhadap satuan Kodim Sukoharjo telah berhasil membangun kepercayaan yang mendukung pada pelaksanaan kolaborasi Pengembangan potensi ekonomi lokal oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dan Kodim Sukoharjo. Namun belum adanya petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan kolaborasi menyebabkan pembagian tugas masih didasarkan pada regulasi induk kedua instansi tersebut.

Terakhir pada aspek kekompakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembinaan teritorial pengembangan potensi ekonomi lokal yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah Sukoharjo dan Kodim Sukoharjo menunjukkan kekompakan yang baik, namun kekompakan yang ditunjukkan masih bersifat seremonial dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak ada tindak lanjut setelahnya. Pemerintah Daerah Sukoharjo masih bergantung pada peran dari Kodim Sukoharjo. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman yang kurang terkait dengan pembinaan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

teritorial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengembangkan potensi lokal masih menghadapi kendala seperti kurang optimalnya pemahaman Pemda terkait dengan pelaksanaan Binter yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan, SDM Personil Satuan Komando Kewilayahan yang masih kurang jika dihadapkan pada pelaksanaan Binter, respon yang kurang baik ditunjukkan oleh Pemda, tingkat pemahaman Babinsa dalam mengaktualisasikan program pembangunan ekonomi ke masyarakat yang masih terbatas serta belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci terkait dengan pelaksanaan fungsi Binter yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Azwar. Widjaja. 2009. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Budiman, 2003, Peningkatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Korem 121/ABW dihadapkan dengan Tantangan Kewilayahan, Spersad, Jakarta
- Budiyanto, Rachmat, 2009, Peningkatan Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Sishankamrata Guna Ketahanan Nasional, Lemhannas, Jakarta
- Emily R. Lai. 2011. Collaborations: A Literature Review, Pearson.
- Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks. Kelompok Gramedia.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Mulyono. 2019. Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta, Jurnal Yudhagama, Vol. 1, No. 245, Tahun 2009
- R Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Good governance and legal

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

-
- reform in Indonesia,(Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007)
- Ritohardoyo, S, 2002, “Penggunaan dan Tata Guna Lahan”, Fakultas Geografi, UGM: Yogyakarta.
- Subagyo, Agus, 2023. Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Methods, Malang : PT. Cita Intrans Selaras.
- Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media
- Tarigan, Robinson, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama.
- West, Michael. 2002. Kerja Sama yang Efektif. Cetakan Kelima. Penerjemah: Srikandi Waluyo. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Jurnal

- Gabrillin, Abba. 2017. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, Ini Penyebabnya. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sumber Lain

- Buku Putih Pertahanan RI, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2003
- Danpusterad, 2011, Bahan Seminar Nasional Teritorial: Berbagai Permasalahan Teritorial dalam Pelaksanaannya di Lapangan.
- Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi Keputusan Panglima TNI Nomor

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Kep/1024/XII/2020

Doktrin Teritorial TNI AD Keputusan Kasad Nomor KEP/878a/XII/2021

Juknis tentang Lima Kemampuan Teritorial Keputusan Kasad Nomor
KEP/653/VIII/2020

Juknis tentang Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kep Kasad Nomor
Kep511/XII/2015